

Tabel UP-12. Produk Hukum Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi : Papua
Tahun Data : 2010

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1	Kota Jayapura	1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK. II	10	1996	Ketentuan Pelayanan Pembuangan Limbah Cair (LD Nomor : 67 Tahun 1997 Seri : D, Nomor : 67)
			5	1998	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan (LD Nomor : 24 Tahun 1999, Seri : A, Nomor : 4)
			6	1998	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C (LD Nomor : 25 Tahun 1999, Seri : A, Nomor : 5)
		2. Peraturan Daerah	17	2001	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1998, tentang Pajak Pengambilan dan pengelolaan Bahan Galian C (LD Tahun 2001, Nomor : 76)
			21	2001	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 23 Tahun 1998, tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (LD Tahun 2001, Nomor : 81)
			9	2003	Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (LD Tahun 2003, Nomor : 48)
			11	2004	Rumah Potong Hewan dan Penjualan Daging (LD Tahun 2004, Nomor : 38)
			10	2007	Penyelenggaraan Kebersihan (LD Tahun 2007, Nomor : 12)
			1	2008	Ijin Usaha Perikanan (LD Tahun 2008, Nomor : 2)
			5	2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (LD Tahun 2008, Nomor : 5)
2	Jayapura	1. Peraturan Daerah	3	2000	Pelestarian Kawasan Hutan Sagu (LD Tahun 2000 Nomor : 23)
			16	2009	Pengelolaan Kawasan Lindung kabupaten Jayapura
			21	2009	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028
		2. Keputusan Bupati	282	2003	Penetapan Nilai Jual Atau Harga Standart Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kabupaten Jayapura
			91	2004	Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya di Pedesaan Kabupaten Jayapura Tahun 2004
			162	2005	Pembentukan TIM Pengendali Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2005
			21	2006	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kabupaten Jayapura Periode 2006-2010
			245	2006	Pembentukan TIM Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2006
			256	2006	Pembentukan TIM Penilai Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Tahun Anggaran 2004

Lanjutan Tabel UP-12.

No.	Kabupa- ten/Kota	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
			260	2006	Pembentukan TIM Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kampung Waibron Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura
			261	2006	Pembentukan TIM Gabungan Klonitoring Bahan Pokok, Pengawasan Barang Beredar dan Surat-surat Perijinan Bidang Usaha dan Bangunan Tahun 2006
			5	2007	Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu, An. PT. Sagatama Mulia Cabang Jayapura
			222	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Kepada PT. Tablasufa Nickel Mining
			223	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Emas Kepada PT. Dian Mutiara Perkasa
			224	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Emas Kepada PT. Globalindo Sentraprasarana
			225	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya Kepada PT. Suriapilar Global Jaya
			226	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya Kepada PT. Duta Kencana Nusantara
			227	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Kepada PT. Tambang Alam Sejahtera
			228	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Kepada PT. Sinar Global Kencana
			229	2007	Izin Pengoperasian Airstrip Cenderawasih Milik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa di Lereh Kabupaten Jayapura
			230	2007	Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Emas Kepada PT. Dutaraya Putra Wira
			232	2007	Pembentukan TIM Penulis Buku Modal Sosial Pembangunan Gambaran dari Dua Distrik di Kabupaten Jayapura
		3. Instruksi Bupati	1	2006	Gerakan wajib Tanam Kakao
		4. Peraturan Bupati	7	2008	Kelayakan Lingkungan Rencana Perkebunan Kelapa Sawit Distrik Guay Kabupaten Jayapura

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
3	Merauke	1. Peraturan Daerah	2	1998	Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
			9	2005	Nilai Pasar Produksi Bahan Galian Golongan C Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Tahun 2005
			10	2005	Prosedur Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi
			11	2005	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)
			3	2006	Standart Minimum Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Biaya Paksaan Penegakan Hukum dan Penggunaannya
			4	2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Merauke Nomor : 2 Tahun 1998, Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
			5	2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Merauke Nomor : 17 Tahun 1998, Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
			7	2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 4 Tahun 2004, Tentang Restribusi Izin Usaha Perikanan
			6	2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten No. 2 Tahun 2004, tentang Restribusi Penggantian Biaya Administrasi
			8	2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Merauke No. 35 Tahun 1998, tentang Restribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
		2. Keputusan Bupati	41	2000	Nilai Pasar Hasil Produksi Bahan Galian Golongan C Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Tahun 2000
			365	2007	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
			294	2009	Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Perluasan Pencetakan Lahan Sawah Program Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2009
		3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan	050.2278/ PKP-TP/07	2007	Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Konstruksi Pencetakan Lahan Sawah 500 Hektar Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2007
			050.4783/ SK-CS/PLA-BANSOS/ MRK/2008	2008	Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Pencetakan Lahan Sawah Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2008
4	Mappi	1.			
		2. dst.....			
5	Biak Numfor	1.			
		2. dst.....			
6	Supiori	1.			
		2. dst.....			

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
7	Jaya-wijaya	1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Jayawijaya	9	1995	Restribusi Atas Ijin Pengelolaan Kopi, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Kopi
			7	1998	Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian C
			8	1998	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan
		2. Peraturan Daerah	11	2000	Restribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
			7	2006	Perubahan Pertama Atas PERDA Kabupaten Jayawijaya No. 10 Tahun 2000, tentang Restribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
			13	2006	Restribusi Pengiriman Hasil Bumi Ke Laut Kabupaten Jayawijaya
		3. Keputusan Bupati	56	2000	Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Jayawijaya
			253	2001	Penertiban Restribusi Hasil Hutan Kayu
			269	2002	Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi untuk Penyediaan Air Bersih
			121	2009	Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya No. 224 Tahun 2006, tentang Pembentukan TIM Unit Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar Pedesaan Kabupaten Jayawijaya
			280	2009	Pungutan/ Restribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Pos Wouma, Kodim dan Holima dan Perhitungan RAB oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya
			98	2010	Penetapan Besaran Biaya Tarif Pengujian Kualitas Air pada Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
			202	2010	Pembentukan TIM Monitoring dan Pengawasan Terhadap Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Depot Air Minum di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010
			204	2010	Penunjukan dan Pemberian Kewenangan Badan Lingkungan Hidup sebagai Intansi Penguji dan Pemeriksa Kualitas Air di Kabupaten Jayawijaya
		4. Peraturan Bupati	11	2010	Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air
8	Yahukimo	1.			
		2. dst.....			
9	Tolikara	1.			
		2. dst.....			
10	Peg. Bintang	1.			
		2. dst.....			
11	Puncak Jaya	1.			
		2. dst.....			

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
12	Keerom	1.			
		2. dst.....			
13	Nabire	1.			
		2. dst.....			
14	Sarmi	1.			
		2. dst.....			
15	Asmat	1.			
		2. dst.....			
16	Boven Digul	1.			
		2. dst.....			
17	Mimika	1. Peraturan Daerah	5	2001	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika Tahun 2000-2010
			20	2002	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golian C
			21	2002	Restribusi Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ Ternak, Bahan Asal Hewan/ Ternak, Hasil Bahan Asal Hewan dan Ternak dan Sarana Produksi Perternakan Ke dan Dari Kabupaten Mimika.
			26	2003	Pengelolaan dan Restribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
			6	2007	Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Mimika
18	Paniai	1.			
		2. dst.....			
19	Kepulauan Yapen	1. Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen	108	2004	Restribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Kayu Olahan/ Gergajian Lokal
		2. Peraturan Daerah	7	2009	Pajak Pengambilan, Pengolahan, Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C
			12	2009	Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
20	Waropen	1.			
		2. dst.....			

Keterangan : Data Produk Hukum Kabupaten Lain Belum Di Himpun Karena T.A. 2010 Dana Yang Disiapkan Hanya Untuk 7 Lokasi Kegiatan

Sumber : BPSDALH Provinsi Papua, dalam Laporan Himpunan Produk Hukum SDALH Tahun 2010